

Title : Budaya Patriarki Dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Di Indonesia

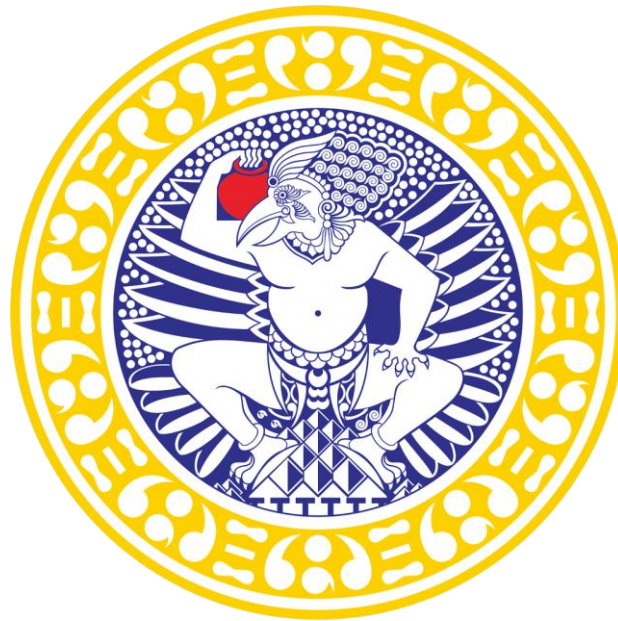
Author(s) : Farah Elfida Rahma, Tiara shafa Rizqfiana, Raihan Rahmatullah Insani, Fikry Ammar

Institution : Program Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

Category : Article

Topics : Culture, Communication, Education, Law, Policy, Government

**BUDAYA PATRIARKI DAN KETIDAKSETARAAN GENDER
DALAM LINGKUP PENDIDIKAN DI INDONESIA**



DISUSUN OLEH :

Farah Elfida Rahma
Tiara shafa Rizqfriana
Raihan Rahmatullah Insani
Fikry Ammar

UNIVERSITAS AIRLANGGA

SURABAYA

2022

Budaya Patriarki dan Ketidaksetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan Di Indonesia

Program Studi Manajemen Pemasaran, Fakultas Vokasi, Universitas Airlangga

PENDAHULUAN

Pada masa sekarang ini, pendidikan dapat dikatakan sebagai suatu kebutuhan yang penting dan sangat diutamakan oleh kalangan masyarakat. Karena selain sebagai sarana dalam mengembangkan potensi dan karakter individu, pendidikan dapat juga berfungsi sebagai jalan untuk mendapatkan sebuah *prestise* dan *privilege* dalam kehidupan bermasyarakat. Maka dari itu, tidak jarang ditemukan para orang tua yang memilih lembaga atau institusi pendidikan terakreditasi tinggi yang dapat menjamin kesuksesan anak mereka, tanpa memperhitungkan biaya dan usaha yang perlu mereka keluarkan. Dr. John Dewey (dalam Nasatsha, 2013 : 54) berpendapat bahwa pendidikan merupakan suatu proses pengalaman, karena dalam kehidupan, pendidikan membantu pertumbuhan batin tanpa dibatasi oleh usia seseorang. Dengan adanya pendidikan, diharapkan dapat membantu pembelajaran moral serta dapat mengasah suatu kemampuan yang dimiliki oleh tiap individu yang nantinya akan berguna dalam berbagai aspek kehidupan. Suatu negara dapat dikatakan mencapai suatu kemajuan apabila telah memiliki tingkat pendidikan yang baik, merata, dan berkualitas bagi seluruh masyarakatnya (Rahmat, 2018). Untuk mencapai hal tersebut, tentu diperlukan suatu pengorbanan dan usaha yang besar. Pendidikan yang berkualitas nantinya akan melahirkan generasi baru yang akan menjadi penerus dan memegang tanggung jawab atas masa depan suatu negara.

Namun sayangnya, di zaman yang modern ini, dapat ditemukan beberapa masyarakat yang tidak mendapatkan kesempatan yang sama untuk menempuh pendidikan formal. Dapat dikatakan bahwa pendidikan di Indonesia masih belum merata dirasakan oleh seluruh masyarakatnya. Meratanya kesempatan untuk mendapatkan pendidikan tanpa memandang latar belakang, seperti tingkat ekonomi, keluarga, maupun jenis kelamin sudah diperjuangkan sejak sebelum abad ke-20. Apabila melihat kembali pada keadaan pendidikan di Indonesia sebelum abad ke-20 atau sebelum zaman modern, perempuan dan laki-laki tidak dapat disejajarkan atau disamaratakan dalam aspek apapun, khususnya dalam aspek pendidikan.

Perempuan pada zaman tersebut seperti dipaksa untuk melayani dan mengurus rumah tangga tanpa perlu mengenyam pendidikan maupun ilmu pengetahuan lainnya. Hal tersebut mengakibatkan perempuan pada zaman itu tidak dapat memiliki kebebasan yang seharusnya mereka dapatkan baik dalam hal pemikiran, kegiatan, maupun potensi lainnya. Permasalahan seperti itulah yang kemudian mendorong beberapa tokoh perempuan seperti Raden Ajeng Kartini atau R. A. Kartini untuk memperjuangkan pendidikan yang setara antara kaum perempuan dengan laki-laki di lingkup pendidikan dengan bentuk emansipasi atau kesamaan hak yang sudah seharusnya dimiliki oleh kedua gender, baik perempuan maupun laki-laki.

Namun, meskipun upaya untuk menegakkan kesetaraan gender dalam lingkup pendidikan tidak henti dilancarkan, kenyataannya masalah ini masih saja belum terselesaikan. Bahkan di zaman yang sudah modern ini, masalah diskriminasi terhadap kaum perempuan masih dapat ditemukan diberbagai aspek lain dalam kehidupan masyarakat. Selain itu, dengan masih melekatnya budaya patriarki dalam masyarakat, menimbulkan batasan akses menyulitkan kaum perempuan dalam perjuangan mendapatkan kesetaraan hak.

METODE

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode studi kepustakaan atau *literature study* yang dianalisis dengan komprehensif, kritis, dan objektif mengenai topik yang dibahas. Zed (2008 : 3) mengartikan bahwa metode studi literatur sebagai serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka, membaca dan mencatat, serta mengolah bahan penelitian. Data yang disajikan dalam penulisan ini bersumber dari hasil-hasil penulisan sebelumnya yang telah dipublikasikan dan diterbitkan dalam jurnal nasional yang kemudian dianalisis untuk mendapatkan hasil penulisan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Emansipasi Pendidikan Oleh R. A. Kartini

Pendidikan secara harfiah mempunyai arti membangun manusia seutuhnya dan peradaban bangsa. Selain itu, pendidikan adalah hak setiap warga negara untuk dapat meningkatkan harkat dan martabatnya dalam masyarakat. Pendidikan formal mulai dikenalkan kepada masyarakat Indonesia pada masa Politik Etis oleh salah satu tokoh ahli hukum Belanda, Conrad Theodor Van Deventer. Beliau berpendapat bahwa Belanda sudah terlalu banyak memeras Indonesia dari segi kekayaan hingga tenaga manusia. Maka dari itu, dengan adanya kebijakan politik etis, diharapkan dapat membayar Indonesia dengan upaya-upaya yang diberikan oleh Belanda, yaitu pendidikan, migrasi, dan pengairan. Kehadiran kebijakan politik etis pada bidang pendidikan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran nasionalisme bangsa yang mulai bangkit yang pada akhirnya melahirkan berbagai generasi terpelajar. Sayangnya, pada waktu itu hanya masyarakat Belanda, Eropa, Tionghoa, dan rakyat Indonesia yang terpandang saja yang boleh mengenyam bangku pendidikan. Pihak kolonial membatasi perempuan untuk mendapatkan akses pendidikan formal. Ditambah lagi dengan pemerintah saat itu yang konservatif dan skeptis yang tidak memprioritaskan perempuan dan (Ricklefs, 2017 : 237). Dengan pengertian bahwa meskipun Politik Etis memberikan dampak yang baik bagi rakyat Indonesia, tetapi pada kenyataannya pada aspek pendidikan tidak semua lapisan masyarakat dapat menerima dan merasakan pendidikan formal yang layak, terutama bagi kaum perempuan.

Pada masa itu juga, masyarakat masih kental pemikiran bahwa laki-laki menempati kedudukan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan perempuan dalam kehidupan sosial.. Laki-laki dianggap sebagai seorang pemimpin perempuan dengan memegang kekuasaan yang membatasi kemerdekaan perempuan dengan tidak memberikan perempuan kesempatan untuk memiliki sebuah keinginan atau cita-cita yang tinggi dalam kehidupan mereka. Karena pada akhirnya, menurut mereka perempuan hanya ditempatkan sebagai ibu yang mengurus keluarga dan anak-anaknya. Pemikiran-pemikiran seperti itulah yang kemudian membuat R. A. Kartini merasa perlu melakukan sebuah tindakan agar kaum perempuan pada masanya dapat merasakan pendidikan yang sama dengan kaum laki-laki. Menurutnya, pendidikan tidak seharusnya dibatasi oleh jenis kelamin, karena pendidikan adalah tentang budi dan jiwa (Pramudawardhani, 2019). Maka dari itu, lahirlah sebuah gagasan oleh R. A. Kartini mengenai

kesamaan hak yang seharusnya dimiliki oleh kedua pihak laki-laki dan perempuan atau bisa juga disebut dengan emansipasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, pendidikan seharusnya diawali dari keluarga sebagai sebuah starting level bagi seorang anak (Natasha, 2013:4). Oleh karenanya, dalam sebuah keluarga perlu diajarkan pendidikan moral sejak anak-anak masih kecil oleh seorang ibu yang notabenehnya mengurus anak-anak. Dengan begitu, para ibu sewajarnya pernah menempuh proses pendidikan yang memadai baik demi berkembangnya keterampilan anak-anaknya maupun demi dirinya sendiri. Pada masa mendatang, dengan adanya kaum perempuan yang berpendidikan, diharapkan dapat ikut serta dalam memajukan kehidupan bangsa yang seimbang.

Kesetaraan Gender

Permasalahan mengenai kesetaraan gender rupanya masih menjadi masalah yang krusial di Indonesia. Ditambah lagi dengan masih melekatnya pemahaman tradisional pada masyarakat, yaitu anggapan bahwa dalam suatu suku atau daerah, sudah selayaknya dipimpin oleh seorang laki-laki dan bukan seorang perempuan. Pemahaman seperti inilah yang kemudian justru akan menjadi doktrin bagi generasi selanjutnya yang pada akhirnya, akan mengakibatkan kesalahpahaman mengenai kodrat antara laki-laki dengan perempuan pada kehidupan sosial. Masyarakat nantinya akan beranggapan bahwa laki-laki berada pada kedudukan yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan perempuan, bahwa laki-laki dikodratkan sebagai seorang pemimpin dan perempuan menempati kodrat sebagai yang lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki. Segala upaya dan usaha untuk membawa kesetaraan bagi perempuan atau memperjuangkan emansipasi perempuan di masyarakat, sudah dilakukan oleh tokoh-tokoh perempuan terdahulu, salah satunya adalah R.A. Kartini, Dewi Sartika, dan Cut Nyak Dien. Namun, seakan-akan perjuangan mereka hanyalah menjadi teori dengan sedikit implementasi secara langsung di masyarakat saja. Akibatnya, pemahaman masyarakat terdahulu yang lebih mementingkan laki-laki untuk memperoleh pendidikan daripada perempuan, dapat terus melekat dalam pemikiran masyarakat.

Berbicara mengenai kesetaraan gender, pengertiannya memiliki berbagai makna yang tersebar luas dalam masyarakat. Menurut Sulistyowati (2020), gender merupakan bentuk fisiologis dari tingkah laku dan segi nilai yang dapat membedakan laki-laki dan perempuan,

secara singkat dikenal dengan jenis kelamin. Kajian konsep mengenai seks, gender dipahami sebagai suatu dasar untuk menentukan perbedaan antara laki-laki dan perempuan dalam kebudayaan dan kehidupan masyarakat (Sumar, 2015). Sedangkan kesetaraan gender dapat dimaknai dengan laki-laki dan perempuan memiliki hak, kedudukan, dan kesempatan yang sama untuk mengambil bagian dan berperan penting dalam perkembangan pendidikan, sosial, ekonomi, budaya, keamanan, dan pertahanan sehingga dapat membangun keadaan suatu tatanan menjadi lebih baik bersama. Muthoifin *et al* (2017) menyatakan bahwa kesetaraan gender merupakan kondisi dimana perempuan dan laki-laki memperoleh hak yang sama sebagai manusia dan memiliki akses dan kontrol yang sama pula. Kesetaraan gender adalah tujuan utama bagi peradaban manusia agar tercapainya titik kesejahteraan dalam kehidupan bermasyarakat. Kesetaraan gender dapat dikatakan terealisasi jika telah mencapai kesamaan hak bagi perempuan maupun laki-laki agar keduanya dapat memperoleh dan berperan aktif dalam pembangunan, sosial, pendidikan, dan aspek aspek lainnya dalam kehidupan masyarakat tanpa adanya diskriminasi dengan dasar jenis kelamin atau seks seseorang.

Budaya Patriarki Dalam Pendidikan

Pendidikan adalah sebuah hak yang harus dimiliki oleh setiap manusia untuk mempersiapkan dirinya sebelum terjun ke dalam masyarakat. Sayangnya, hal tersebut belum sepenuhnya terwujud secara merata pada kehidupan masyarakat, terutama pada kaum perempuan. Pada masa dahulu, beberapa orang tua hanya menyekolahkan anak laki-lakinya saja dan membiarkan anak perempuannya tanpa mengenyam pendidikan lanjutan atau tidak sama sekali. Hal ini dikarenakan adanya budaya patriarki yang sudah ada dan berkembang sejak dahulu, yang kemudian menjadi suatu nilai dalam masyarakat. Laki-laki selalu dianggap memiliki peran yang lebih penting dalam menuntut ilmu jika dibandingkan dengan perempuan. Masyarakat beranggapan bahwa ilmu yang dienyam laki-laki, nantinya akan berguna dalam dunia pekerjaan, mengingat kodrat laki-laki dalam budaya patriarki adalah sebagai kepala keluarga yang mencari nafkah dengan bekerja. Inilah yang menjadi alasan mengapa laki-laki dirasa lebih pantas mendapatkan pendidikan daripada perempuan. Karena pada akhirnya, pihak laki-laki lah yang akan menjadi kepala keluarga dan bekerja. Sedangkan perempuan, hanya akan kembali ke dapur dan merawat keluarga serta rumah tangganya. Meskipun perempuan memilih untuk berpendidikan tinggi, masyarakat akan tetap beranggapan bahwa ilmu yang dipelajari oleh perempuan saat menganut pendidikan dirasa tidak akan bermanfaat. Dengan

asumsi seperti itu, pendidikan yang tinggi akan terus dianggap kurang penting bagi perempuan dan akan mengarah pada diskriminasi dalam mendapatkan kesempatan pendidikan yang sama.

Diskriminasi gender menimbulkan efek yang akan meluas ke dalam segala lingkup tatanan sosial. Tidak hanya pada aspek sosial, tetapi juga aspek pendidikan, politik, dan budaya. Walaupun pemerintah sudah memberikan kebebasan hak untuk mendapatkan pendidikan kepada seluruh lapisan masyarakat, hal tersebut tidaklah terlalu berguna jika paradigma patriarki masih melekat pada pola pikir masyarakat. Kemudian justru mengakibatkan asumsi bahwa posisi ideal seorang perempuan adalah sebagai pengurus rumah keluarga dan bukan sebagai pekerja. Dalam lingkup sosial, perempuan lebih sering mendapatkan perlakuan yang kurang adil dan sering dinomorduakan setelah laki-laki. Ditambah dengan posisi perempuan yang ditempatkan pada posisi terpinggirkan dalam masyarakat dan diharapkan untuk tunduk pada laki-laki, mempermudah perempuan untuk mengalami eksploitasi oleh pihak laki-laki. Hal seperti itu dapat terjadi pada masyarakat karena budaya patriarki yang masih melekat.

Patriarki didefinisikan sebagai suatu sistem dimana laki-laki memiliki kekuasaan dan peran yang lebih besar dalam kehidupan dan mengacu pada susunan masyarakat menurut garis keturunan Ayah. Patriarki juga dianggap memiliki kekuasaan yang mendominasi serta dapat mengontrol pihak lain yang lebih lemah darinya. Struktur budaya patriarki juga melahirkan keterbatasan kepada perempuan dalam hal pengambilan keputusan, baik di dalam keluarga maupun dalam kehidupan masyarakat (Arjani, 2007). Pengkonstruksian budaya patriarki, biasanya dimulai dalam lingkungan keluarga dan masyarakat yang seperti tiba-tiba terjadi begitu saja. Wardani (dalam Nursaptini *et al*, 2019) berpendapat bahwa keluarga yang menganut sistem patriarki lebih memberikan kesempatan yang layak untuk memperoleh pendidikan lebih tinggi kepada anak laki-laki saja daripada anak perempuan. Para orang tua juga akan lebih mementingkan pendidikan yang tinggi untuk anak laki-lakinya dan tidak terlalu mementingkan pendidikan perempuan yang lalu akan berimbas pada sulitnya akses pendidikan untuk kaum perempuan. Bagi mereka, pendidikan tidaklah terlalu penting bagi perempuan. Perempuan pada hakikatnya tidak pantas untuk mengenyam pendidikan tinggi karena perempuan lebih baik langsung menikah dan mengurus keluarganya nanti. Pekerjaan yang perempuan lakukan adalah mengurus rumah tangga serta keluarga, atau pekerjaan lainnya yang tidak memerlukan status pendidikan tinggi.

Paham patriarki dalam masyarakat bahwa perempuan hanya bisa mengurus rumah tangga, membuat perempuan enggan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih

tinggi. Meskipun ada beberapa perempuan yang tetap memutuskan mengemban pendidikan ke tahap yang lebih tinggi seperti bangku perkuliahan hingga memperoleh gelar pendidikan, tetapi tidak menutup stigma penduduk Indonesia yang beranggapan bahwa perempuan hanya akan menjadi ibu rumah tangga. Jika stigma mengenai perempuan yang menempuh pendidikan tinggi hanya akan berakhir menjadi ibu rumah tangga dan tidak selayaknya bekerja tetap ada pada pola pikir masyarakat, kedepannya akan merugikan pihak perempuan-perempuan yang ingin menempuh pendidikan tinggi nantinya. Selain itu, rendahnya kontribusi perempuan di beberapa bidang keahlian, pendidikan, dan birokrasi akibat pengelompokan gender menyebabkan kurang optimalnya pengembangan potensi perempuan saat ini (Haslita *et al.* 2021). Apabila perempuan memperoleh pendidikan yang layak dan setara seperti pemberian kesempatan untuk memegang tanggung jawab yang sama seperti laki-laki pada umumnya, tidak menutup kemungkinan bahwa kontribusi yang diberikan akan mengecewakan. Salah satu contoh yang dapat ditemukan dalam masyarakat adalah mantan Menteri Keuangan Republik Indonesia, Sri Mulyani, yaitu salah satu perempuan Indonesia yang telah memberikan kontribusi besar dalam perkembangan ekonomi negara pada beberapa tahun terakhir (Rundengan *et al.* 2017). Maka dari itu, banyak aktivis yang terbentuk untuk memberi pembelaan terhadap keadilan dan kesetaraan gender diberbagai belahan dunia dan juga di Indonesia. Tuntutan akan keadilan terhadap kaum perempuan untuk memperoleh hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, keadilan, pengembangan potensi, dan kesetaraan dalam tatanan sosial.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Pendidikan merupakan suatu hak yang seharusnya dimiliki oleh seluruh masyarakat dengan setara, bukan hanya merujuk pada satu gender tertentu. Dengan kata lain, perempuan seharusnya memiliki hak mendapatkan pendidikan yang setara dengan laki-laki tanpa adanya salah satu gender yang mendominasi dalam mendapatkan pendidikan yang layak. Namun pada kenyataannya, dalam kehidupan masyarakat kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan yang seharusnya menjadi hal yang lumrah, justru sulit untuk dicapai. Padahal, gagasan mengenai kesetaraan dalam mendapatkan pendidikan sudah ditegaskan sejak masa Politik Etis pada pimpinan kolonial Belanda, yang dicetuskan oleh salah satu tokoh perempuan bernama R. A. Kartini. Beliau mengatakan bahwa perempuan pada masanya tidak dihargai sebagai seorang

manusia yang juga memiliki hak seperti kaum laki-laki. Bahkan, masyarakat beranggapan bahwa perempuan tidak memiliki kesempatan untuk berperan penting dalam kehidupan masyarakat pada saat itu. Seluruh kebebasan yang dimiliki oleh perempuan seperti dirampas oleh kaum laki-laki yang dianggap memiliki kodrat sebagai pemimpin keluarga dengan perempuan yang memiliki kodrat hanya sebagai pengurus rumah tangga. Dengan begitu perempuan tidak memerlukan pendidikan formal demi mencapai cita-cita dan keinginannya yang bahkan sejak awal, perempuan seperti tidak diizinkan memiliki cita-cita dan keinginan selain untuk menikah dan mengurus rumah tangga.

Di Indonesia, walaupun ditemukan berbagai gerakan perjuangan untuk mendapatkan kesetaraan hak dalam mendapatkan pendidikan, kenyataannya di lapangan membuktikan bahwa pemahaman masyarakat mengenai kesetaraan gender masih terbatas. Salah satunya contohnya adalah dalam beberapa lapisan masyarakat, masih ditemukan orang yang berkeyakinan bahwa perempuan tidak terlalu memiliki peran penting dalam masyarakat karena memiliki fisik dan pemikiran yang lemah dan tidak sebanding dengan laki-laki. Selain itu, dalam dunia pendidikan, terlihat jelas seperti adanya garis pemisah antara perempuan dengan laki-laki yang timbul karena adanya budaya patriarki dalam masyarakat. Dengan adanya keyakinan tersebut, tentu saja tidak memungkinan perempuan untuk dapat menyaingi lakilaki dalam hal apapun, bagaimanapun kondisinya. Maka dari itu, karena masyarakat beranggapan bahwa perempuan adalah memiliki sifat yang lemah dan tidak terlalu berperan baik dalam masyarakat, pendidikan bagi perempuan juga tidak lah penting. Bagi penganut budaya patriarki, perempuan tidak selayaknya mengenyam pendidikan karena kodrat perempuan adalah sebagai pelengkap laki-laki dalam keluarga.

Saran

Budaya patriarki dalam masyarakat tentu membawa dampak yang buruk, baik bagi pihak perempuan maupun pihak laki-laki. Maka dari itu, untuk mengurangi adanya pemahaman tentang budaya patriarki yang nantinya hanya akan membawa dampak yang buruk bagi kedua gender, perlu dilakukan sebuah perubahan pemahaman tentang kesetaraan gender di kalangan masyarakat secara perlahan, yang dapat dimulai dari lingkungan kecil seperti keluarga. Orang tua perlu memiliki pengetahuan awam dan mengubah pemikiran mereka terhadap kesetaraan gender antara anak perempuan dan anak laki-laki. Selain itu, orang tua perlu memberikan kesempatan yang sama bagi anak-anaknya agar anak perempuan tidak merasa seperti berada

pada tingkatan lebih rendah daripada laki-laki. Menurut Hasil Penelitian oleh Atta (dalam Nursaptini *et al*, 2019), dijelaskan bahwa jika masyarakat mengubah sikap negatifnya terhadap akses anak perempuan ke pendidikan, hal tersebut akan memulai revolusi dalam pendidikan anak perempuan. Tidak hanya itu, kesetaraan gender dalam bidang pendidikan juga akan lebih mudah untuk dicapai

DAFTAR PUSTAKA

- Arjani, Ni Luh. (2007). Feminisasi Kemiskinan dalam Kultur Patriarki. *Jurnal Studi Gender SRIKANDI*, 6 (1) : 9
- Haslita R, Samin R, Kurnianingsih F, Okparizan, Subiyakto R, Elyta R, Anggraini R, Muhazinar, Ardiansya A. (2021). Implementasi Kebijakan Pada Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat* 1 (1) : 81-86
- Mahfud. (2018). Dilematis Tentang Pendidikan Perempuan (Konsep Kesetaraan Gender). *Jurnal Pendidikan Islam* 3 (1) : 46-47
- Muthoifin, Ali M, Wachidah N. (2017). Pemikiran Raden Ajeng Kartini Tentang Pendidikan Perempuan dan Relevansinya Terhadap Pendidikan Islam. *Jurnal Studi Islam* 18 (1) : 36-47
- Natasha, Harum. (2013). Ketidaksetaraan Gender Bidang Pendidikan: Faktor Penyebab, Dampak, dan Solusi. *Jurnal Perempuan, Agama, dan Gender* 12 (1) : 54, 62
- Nursaptini, Sobri, M., Sutisna, Deni., Syazali, M., Widodo, Arif. (2019). Budaya Patriarki dan Akses Perempuan dalam Pendidikan. *Media Transformasi Gender dalam Paradigma Sosial Keagamaan*, 12 (2) : 17, 21
- Pramudawardhani, Ira., Estiana, E. (2019). Perjuangan dan Pemikiran R. A. Kartini Tentang Pendidikan Perempuan. *Journal of History Education and Culture*, 1 (1) : 42, 46-50
- Putra, Deni Adi. (2018). Kesetaraan Gender dalam Pembelajaran di Sekolah Dasar. *Elementary School Education Journal*, 2 (1) : 89-90
- Rahmat, Stephanus Turibius. (2018). Pendidikan Yang Merata dan Berkualitas. *Early Childhood Education Journal of Indonesia*, 1 (2) : 8

Ricklefs, M. C. (2017). *Sejarah Indonesia Modern*. Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.

Rundengan JM, Mangantar M, Maramis JB. (2017). Reaksi Pasar Atas Pelantikan Sri Mulyani Sebagai Menteri Keuangan Pada 27 Juli 2016 (Studi Pada Saham LQ45). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* (2) : 2731-2741

Sumar, Warni T. (2015). Implementasi Kesetaraan Gender Dalam Bidang Pendidikan. *Jurnal Musawa IAIN Palu* : 162

Sulistyowati, Yuni. (2020). Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Pendidikan dan Tata Sosial. *Indonesian Journal of Gender Studies* 1 (2) : 1-12

Zed, Mestika. (2008). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia